

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

Rara Juniar Varina

NPP. 29.0510

*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Keuangan Publik*

Email: rarajuniarvarina10@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The application of accrual-based accounting standards that have not been realized perfectly because there are still some financial reports that are not in accordance with financial accounting standards. **Purpose:** This study aims to understand and analyze the accrual-based implementation of Government Accounting Standards policy standards and targets, resources, relations between organizations, socio-political and economic conditions, and the disposition of the implementor. **Method:** This study uses qualitative writing method, using descriptive methods, and studied with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. **Result:** The findings are the implementation of accrual-based SAP in the preparation of the Bengkulu City government's financial statements has been quite good, but the competence of apparatus resources is still lacking and limited number of apparatus in the field of financial and budget management. **Conclusion:** The accrual-based SAP Implementation in the preparation of the Bengkulu City local government financial report by BPKAD has been running in accordance with the provisions of legislation, but still needs to increase the quantity and quality of budget management apparatus resources in every regional apparatus, it is necessary to have an information technology application system in the form of an online website to all areas of the city of Bengkulu.

Keywords: Implementation Government Accounting Standards, Accrual based, and Local Government Financial Report

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang belum terealisasi dengan sempurna dikarenakan masih ada beberapa laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi keuangan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilihat dari aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial politik dan ekonomi, dan disposisi implementor. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif, dan dikaji dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik, tetapi kompetensi dari sumber daya aparturnya masih kurang dan jumlah aparatur yang masih terbatas dalam bidang pengelola keuangan dan anggaran. **Kesimpulan:** Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelolala anggaran pada setiap OPD, dan juga perlu adanya sistem aplikasi teknologi informasi dalam bentuk *website* yang *online* ke semua OPD Kota Bengkulu.

Kata kunci: Implementasi SAP, Basis Akrual, dan Laporan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan secara efisien, ekonomis, efektif, terbuka, bertanggung jawab, tertib, dan taat pada aturan perundang-undangan menjadi latar belakang lahirnya sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman daerah untuk melaksanakan amanat dari pemerintah pusat untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menteri Dalam Negeri juga telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di tahun 2015. Selanjutnya dijabarkan oleh Pemerintah Daerah kota Bengkulu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Tahun 2020, Kota Bengkulu kembali menerima opini WTP yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian, prestasi ini telah diraih 3 kali berturut-turut oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yakni dari

tahun 2018 sampai tahun 2020. Akan tetapi walaupun sudah meraih opini WTP, tetap saja masih ada catatan koreksi yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Berikut beberapa temuan sebagai faktor penghambat optimalnya penyajian LKPD Kota Bengkulu:

1. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang belum terealisasi dengan sempurna, masih ada beberapa laporan keuangan yang belum sesuai SAK.
2. Penatausahaan aset belum cukup optimal dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020.
3. Sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan Kota Bengkulu belum sepenuhnya berkompeten.
4. Belum memahaminya beberapa pegawai terhadap perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual karena sudah terbiasa menerapkan kebijakan akuntansi berbasis kas.

Kendala-kendala yang dijelaskan di atas menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara efektif atas LKPD Kota Bengkulu. Sehingga diperlukan analisa terhadap OPD yang menentukan setiap kebijakan yang diterapkannya dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yakni oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ditambah lagi dengan situasi pandemi *covid-19* memang tidak bisa kita pungkiri, sehingga isi pelaporan keuangan harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Pada kondisi pandemi *covid-19*, memadainya suatu pengungkapan akan menghasilkan transparansi atau keterbukaan yang dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan. BPKAD sebagai suatu entitas harus mempertimbangkan dengan kehati-hatian dan tingkat pengungkapan yang dimasukkan dalam laporan keuangan yang kaitannya dengan *covid-19* dengan tujuan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas bagaimana BPKAD tersebut mengelola suatu risiko dan risiko yang timbul dari instrumen keuangannya.

Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Kota Bengkulu telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam upaya memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kota Bengkulu diharapkan bisa diterapkan dengan baik dan mampu ditingkatkan agar kedepannya bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan sempurna tanpa catatan-catatan lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah Kota Bengkulu, salah satunya yaitu kurangnya kompetensi dari sumber daya aparatur dalam penerapan SAP berbasis akrual dan juga jumlah aparatur yang masih terbatas dalam bidang pengelola keuangan dan anggaran. Kesiapan dari sisi sumber daya manusia yang ada belum seperti yang diharapkan, karena belum idealnya jumlah pegawai secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang berlatar akuntansi dan pekerjaan yang mereka kerjakan, maka kedepannya akan terus menjadi salah satu prioritas perekrutan pegawai berdasarkan kompetensi yang

dimiliki terutama dibidang pengelolaan keuangan dan anggaran dan menguasai komputerisasi dengan baik. Laporan keuangan yang mutu kualitasnya baik dapat terwujud dari pemahaman kapasitas sumber daya manusianya, disini sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur atau staf pengelola keuangan pemerintahan daerah. Staf di BPKAD Kota Bengkulu saat ini, sedikit cenderung resisten terhadap perubahan, namun sudah mulai perlahan adaptif terhadap kebijakan yang berlaku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan berkaitan dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman berjudul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Sulaiman, 2016), menemukan bahwa meningkatnya kesiapan penerapan SAP berbasis akrual yang dihasilkan dari kualitas sumber daya yang baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Penelitian Sitti Hartina Idrus yaitu Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Sitti Hartina Idrus, 2018) menemukan bahwa kualitas pada laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah cukup baik dan terdapat adanya pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Nurahdia Ninsi berkaitan dengan Penerapan *Accrual Basic* Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Nurahdia Ninsi, 2021) yang menemukan bahwa Pemerintah daerah Takalar sudah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu pada masa pandemi *covid-19*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penulisan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif, dan dikaji dengan pendekatan induktif. Penelitian sebelumnya terfokus pada kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada masa pandemi *covid-19*. Dimana dalam kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *covid-19* diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 mengenai pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *covid-19*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu pada masa pandemi *covid-19*, serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan kendala dan upaya BPKAD dalam mengatasi permasalahan penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu pada masa pandemi *covid-19*.

II. METODE

Penulis melakukan penelitian mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada masa pandemi *covid-19* menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terkait model implementasi, yang menunjuk kepada lima variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Disposisi Implementator, serta Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Ditambah dimensi yang digunakan dari konsep implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan dikaji dalam pendekatan induktif. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder yang merupakan sumber tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen, televisi, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka atau dokumentasi. Teknis analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdapat sembilan orang, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Sub Bidang Kebutuhan, Pengadaan dan Penatausahaan, Staf (2 Orang), dan Operator (2 Orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada masa pandemi *covid-19* menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa model implementasi menunjuk

kepada lima variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Disposisi Implementator, serta Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan Standar Akuntansi berbasis akrual tentunya memiliki standar dan sasaran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Kota Bengkulu mengacu pada SAPD terbaru yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai SOP dalam mengerjakan dan menyusun laporan keuangan hal ini berlaku bagi seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Bengkulu. Selanjutnya pemerintah kota Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bengkulu yang mendasar pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan untuk menjadikan apakah LKPD yang ada di kota Bengkulu telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah menjadi standar operasional prosedur pelaksanaan agar laporan keuangan yang berkualitas dapat terwujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Susanda selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 09.00 WIB, mengatakan bahwa:

Pemerintah Kota Bengkulu dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dijelaskan melalui peraturan walikota Kota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang telah disesuaikan dengan SAP berbasis akrual yang dijadikan sebagai landasan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu. Kemudian tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi *covid-19*. Tidak terjadi perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikelola BPKAD pada masa sebelum dan selama pandemi *covid-19*, tetapi berdampak pada beberapa pos dalam laporan keuangan. Pos-pos laporan keuangan yang berdampak cukup signifikan atas pandemi *covid-19* seperti dampak dari *refocusing* anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah melaksanakan sistem serta standar penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual. Tidak ada perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sebelum pandemi *covid-19* dan pada masa selama pandemi *covid-19*. Tetapi berdampak pada beberapa akun atau pos dalam laporan keuangan. Terkait pos-pos laporan keuangan yang berdampak cukup signifikan karena pandemi *covid-19* sebagai dampak atau efek dari adanya *refocusing* atau realokasi anggaran seperti: belanja tidak terduga, belanja modal,

dan belanja barang. Terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang mengakibatkan peningkatan utang, penundaan berbagai proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi penyelesaian dan persediaan. Diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Kurniawan, SE selaku Kepala Subbid Pembukuan dan Pelaporan pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.00 WIB dengan, mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pelaporan keuangan daerah di Kota Bengkulu terkhususnya di BPKAD Kota Bengkulu telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan mengikuti standar yang berlaku sesuai perintah yang tercantum dalam peraturan PP 71 Tahun 2010 serta menyiapkan SOP terkait pelaksanaan sistem baru tersebut yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinilai bahwa untuk setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan telah dibuat standar operasional prosedur yang dimaksudkan agar setiap pelaksana tugas melakukan pekerjaan dengan berdasar pada pedoman yang telah ditetapkan yakni SOP setiap satuan tugas. Demikian halnya dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual telah dibuat SOP yang diwujudkan melalui Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, didapati bahwa belum semua pelaksana tugas sudah mengerti dan mau untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP.

3.2. Sumber Daya

Aspek dari sumber daya yang dikaji yakni dari: Staf, Wewenang, Informasi, dan Fasilitas-fasilitas.

A . Staf

Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini ialah staf di BPKAD Kota Bengkulu sudah cukup baik akan tetapi harus terus dikembangkan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis saat melaksanakan magang di BPKAD Kota Bengkulu menyatakan bahwa lulusan terbanyak adalah lulusan sarjana ekonomi. Hal ini berarti Sarjana lulusan ekonomi masih terbilang cukup untuk mengelola keuangan di BPKAD Kota Bengkulu namun demikian menurut analisa penulis masih terdapat kekurangan yakni keterampilan pegawai terkait akuntansi hanya sedikit menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Septi Mahardini, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan di Kantor BPKAD Kota Bengkulu pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.00 WIB:

Pegawai di BPKAD Kota Bengkulu saat ini yang memahami akuntansi mungkin hanya beberapa orang saja, paling yang mahir itu dibidang kita hanya Bapak Hendra di subbid pembukuan dan pelaporan tetapi ada juga yang paham tetapi itu pun tidak begitu mahir, selanjutnya juga kelemahan lainnya ialah

jumlah pegawai nya sendiri, terutama pada bidang aset yang mengerti tentang akuntansi berbasis akrual ini pun hanya 1 orang jadi diharapkan ada penambahan jumlah pegawai.

Kesiapan dari sisi SDM yang ada saat ini belum seperti yang diharapkan, karena belum idealnya jumlah pegawai secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang berlatar akuntansi dan pekerjaan yang mereka kerjakan. maka kedepannya akan terus menjadi salah satu prioritas perekrutan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki terutama dibidang pengelolaan keuangan dan anggaran dan menguasai komputerisasi dengan baik.

B. Wewenang

Walikota Bengkulu selaku kepala daerah telah menghimbau seluruh perangkat daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan BPKAD sendiri pun juga harus menerapkan serta mengaplikasikan kebijakan tersebut. Walaupun seluruh perangkat daerah sempat bekerja dari rumah (*work from home*) akibat dampak dari pandemi *covid-19* tetapi wajib menerapkan peraturan tentang akuntansi berbasis akrual tersebut.

C. Informasi

Salah satu tugas dan fungsi BPKAD adalah melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal tersebut juga terkait dengan memberikan informasi kepada tiap perangkat daerah lainnya mengenai informasi-informasi terbaru dalam bidang akuntansi. Informasi tersebut seperti perubahan akun yang harus di informasikan terkait akun-akun yang berdampak atas pandemi *covid-19* kepada seluruh perangkat daerah.

D. Fasilitas-fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat dilokasi penelitian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan di Kota Bengkulu khususnya di kantor BPKAD Kota Bengkulu sudah didukung oleh fasilitas yang memadai. Perangkat pendukung seperti personal komputer dan perangkatnya sudah memiliki spesifikasi yang tinggi dan juga penggunaan aplikasi pengelola keuangan yaitu simda versi terbaru. Tetapi masih diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai *user* yang mengoperasikan setiap aplikasi pengelola keuangan daerah.

3.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu berupa proses penyampaian dan pengenalan serta sosialisasi substansi kebijakan terbaru terkait perubahan dari Standar Akuntansi Pemerintah basis *cash toward accrual* menjadi basis akrual penuh. Pemerintah Kota Bengkulu telah menindaklanjuti terkait peraturan perundang-undangan sistem penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual.

Sistem tersebut mempengaruhi pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. Pemerintah Kota Bengkulu telah menginstruksikan kepada seluruh kepala setiap OPD Kota Bengkulu untuk menerapkan SAP basis akrual. Kepala BPKAD Kota Bengkulu telah mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada jajaran aparatur yang dibawahinya untuk menerapkan sistem baru tersebut.

3.4. Disposisi Implementator

Sistem dan prosedur penetapan pejabat yang diberi kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Susanda selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu pada hari kamis tanggal 13 januari 2022 pukul 16.00 WIB, mengatakan bahwa:

Penetapan aparatur untuk memenuhi suatu jabatan khusus terutama bidang pengelolaan keuangan sudah diatur dalam Perda. Tetapi akan lebih baik lagi jika pejabat dipilih juga disesuaikan dengan bidang kompetensi yang dikuasainya agar tidak menghambat pekerjaan pejabat tersebut. Pada pemerintah Kota Bengkulu masih banyak pejabat yang mempati posisi suatu jabatan tidak sesuai dengan kompetensi, tetapi untuk di kantor BPKAD sendiri rata-rata semua aparatur baik yang sudah ASN maupun yang honorer memiliki latar belakang ekonomi. Jadi semua kegiatan pengelolaan keuangan mudah untuk mereka kuasai hanya yang memiliki latar belakang akuntansi saja yang masih kurang terutama pada subbagian akuntansi dan pelaporan keuangan.

Selain kompetensi yang dimiliki, ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam penempatan seorang aparatur yaitu karakter dari aparatur itu sendiri. Karakter akan menentukan kualitas kerja dari seorang aparatur apabila aparatur tersebut memiliki karakter yang baik maka akan baik juga pekerjaan yang dilakukannya.

3.5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Susanda selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.00 WIB, mengatakan bahwa:

Terkait dengan pihak luar dalam artian elit politik disini ialah Walikota Bengkulu, tentunya itu tidak ada kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan bahkan elit politik pun tidak tahu akan penerapan SAP berbasis akrual ini, yang mereka tau adalah hasil akhir dari opini yang diberikan BPK RI mengenai LKPD Kota Bengkulu. Tetapi Walikota Bengkulu ikut andil dalam mensosialisasikan SAP berbasis akrual ini dengan mengeluarkan peraturan Perwali No.38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perwali No 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Walikota Bengkulu telah menindaklanjuti terkait peraturan perundang-undangan sistem penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual. Sistem tersebut mempengaruhi pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. Pemerintah Kota Bengkulu telah menginstruksikan kepada seluruh kepala setiap OPD Kota Bengkulu untuk menerapkan SAP basis akrual. Terkait dengan kondisi lingkungan lainnya seperti sosial, politik dan ekonomi tidak terlalu menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam penerapan SAP berbasis akrual, hanya saja tanggapan dari masyarakat dan elit politik lainnya terhadap hasil akhir dari opini atas LKPD Kota Bengkulu yang jika masih mendapat opini WDP yang membuat pengelola anggaran terkadang disalahkan karena belum tuntas bertanggung jawab secara sempurna dalam mencapai opini WTP.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman berimplikasi pada kesiapan pemerintah daerah dalam rangka menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan berimplikasi pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada masa pandemi *covid-19*, yang mana Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah sangat berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi salah satunya kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola anggaran pada setiap OPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hartina Idrus lebih mengarah kepada kualitas pada laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan adanya pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti mengarah kepada implementasi SAP berbasis akrual serta upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kota Bengkulu dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual di BPKAD Kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurahdia Ninsi berisi tentang penerapan *accrual basic* terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten yang terfokus pada keberhasilan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual akan ditentukan dari keberhasilan pemerintah daerah menyusun laporan operasional. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan atas poin-poin 7 laporan keuangan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standard akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola anggaran pada setiap OPD, dan perlu adanya sistem aplikasi teknologi informasi

dalam bentuk *website* yang *online* ke semua OPD Kota Bengkulu. Disamping itu tidak ada perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sebelum pandemi *covid-19* dan selama pandemi *covid-19*, tetapi berdampak pada beberapa pos dalam laporan keuangan. Pos-pos laporan keuangan yang berdampak cukup signifikan atas pandemi *covid-19* seperti dampak dari *refocusing* anggaran. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di BPKAD Kota Bengkulu yaitu: belum adanya standar dan sasaran yang jelas dan terukur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penerapan SAP berbasis akrual dan penyusunan laporan keuangan, kurangnya kompetensi dari sumber daya aparatur dalam penerapan SAP berbasis akrual, belum tersambungannya *website* dari BPKAD ke OPD di Kota Bengkulu, dan pengelola SAP pada BPKAD belum menunjukkan disiplin dan kerja yang maksimal. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ialah: diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur sebagai acuan dan pedoman dalam implementasi SAP berbasis akrual dalam mempertahankan opini WTP BPK RI, masih perlu ditambah jumlah dan ditingkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang mengelola SAP berbasis akrual, membangun sistem teknologi informasi dalam bentuk *website* pada BPKAD yang *online* dan terhubung kepada seluruh perangkat daerah di Kota Bengkulu, serta diperlukan komitmen untuk menjadikan Pemerintah Kota Bengkulu sebagai wilayah tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Reydonnyzar, Moenek. dan, Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Reydonnyzar, M. Dadang, S., & Basuki, R. 2020. *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosmery, E., Dadang, S., & Umuh, M. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Royadi dan Marja Sinurat. 2017. *Rahasia Cerdas dan Mahir 1001 Tanya Jawab Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Edisi Kedua)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

